



**LAPORAN PENELITIAN**  
**MOBILITAS PENDUDUK DI PULAU JAWA**  
**( Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990)**

Oleh :

Dra Indi Djastuti, MS

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

1996

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Mobilitas Penduduk Di Pulau Jawa  
( Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990)

Peneliti : Nama : Dra Indi Djastuti , Ms

NIP : 131 407 979

Pangkat /gol : IIID

Jabatan : Lektor

Semarang, 16 Juni 1996

Pembimbing,

Peneliti,



Drs. Mudji Rahardjo, SU  
NIP 130 681 637



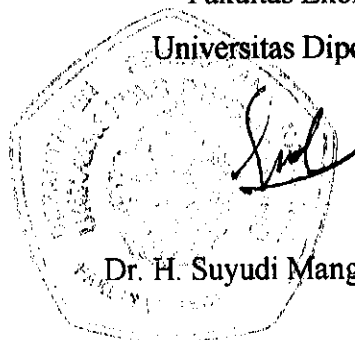
Dra. Indi Djastuti, MS  
NIP 130 407 979

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro



Dr. H. Suyudi Mangunwihardjo

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kami sehingga dapat tersusun laporan penelitian ini, yang merupakan tahapan akhir dari kegiatan penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang MOBILITAS PENDUDUK DI PULAU JAWA yang menggunakan data dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990.

Dengan selesainya kegiatan penelitian ini, kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. H. Suyudi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
2. Drs. Mudji Rahardjo, SU, selaku pembimbing yang telah memberi dorongan kepada kami dalam melakukan kegiatan ini
3. Ketua pusat Studi Kependudukan, atas semua dorongan kepada kami dalam melakukan kegiatan ini.
4. Pimpinan Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah atas bantuan penyampaian data dan informasi mengenai data hasil sensus penduduk
5. Pimpinan Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan
6. Para mahasiswa yang telah membantu tabulasi dan pengolahan data
7. Semua pihak / instansi yang memberikan informasi lebih mendalam dalam analisis penelitian

Kami menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu segala masukan yang akan menjadikan materi laporan menjadi lebih baik, akan kami hargai.

Akhirnya , semoga laporan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, Juni 1996

Peneliti

## INTISARI

Studi tentang migrasi di Pulau Jawa secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi posisi relatif pulau ini dalam jaringan migrasi nasional. Tujuan umum ini dijabarkan lebih lanjut menjadi dua kelompok. Pertama, untuk mengidentifikasi volume dan arah migrasi intraregional dan interregional. Kedua, untuk mengenai arus utama migrasi antara Jawa dengan daerah-daerah lain dan faktor-faktor yang berbentuk pola tertentu. Dari hasil identifikasi kedua tujuan tersebut dibuat interpretasi-interpretasi dalam bentuk kesimpulan. Dari kesimpulan itu dimungkinkan disusun rekomendasi kebijakan-kebijakan sektoral, yang diharapkan mampu mengarahkan migrasi sebagai faktor positif penyumbang pembangunan, baik pada tingkat individu, lokal, regional maupun nasional.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas digunakan data hasil Sensus Penduduk 1980, Supas 1985, dan Sensus Penduduk 1990, terutama untuk melihat perkembangan volume dan arah migrasi dari dan ke Pulau Jawa. Kajian tentang arus dan volume migrasi hanya didasarkan pada dua konsep migrasi, yaitu migrasi semasa hidup dan migrasi risen. Konsep migrasi risen dalam penelitian ini tidak digunakan dalam pembahasan mengenai arah dan volume migrasi karena pola yang dihasilkan sama dengan pola yang dibentuk oleh konsep migrasi semasa hidup. Pada saat penelitian ini dilakukan, data mengenai karakteristik individu dan rumah tangga migran belum selesai diproses di BPS sehingga determinan-determinan migrasi pada tingkat individu tidak dapat digunakan. Dalam beberapa hal data hanya diambil dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan publikasi-publikasi resmi yang lain.

Hasil studi menggambarkan bahwa Pulau Jawa sebagai daerah yang paling berkembang di Indonesia memiliki kondisi demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih baik daripada daerah-daerah lain. Variabel-variabel demografi, seperti jumlah, struktur, dan persebaran keruangan penduduk tampaknya sangat ditentukan oleh keberadaan fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan demikian, variabel-variabel

ketersediaan fasilitas infrastruktur muncul sebagai determinan yang penting dalam studi migrasi intraregional maupun interregional.

Kedudukan Pulau Jawa sebagai core Indonesia dari waktu ke waktu cenderung menguat, sekaligus menempatkan daerah-daerah lain sebagai kawasan periphery. Hal ini antara lain terlihat dari dinamika sebaran spasial aspek-aspek demografi, sosial dan ekonomi, yang mengisyaratkan adanya proses konsentrasi fasilitas infrastruktur transportasi dan komunikasi, fasilitas pelayanan sosial, dan fasilitas pelayanan ekonomi, kemudian diikuti dengan perkembangan demografis, yang secara kuantitatif hanya sedikit mengurangi ketimpangan persebaran spasial yang sudah ada. Secara kualitatif, penduduk yang berpindah masuk ke Pulau Jawa adalah mereka yang terdidik dan memiliki latar belakang sosial ekonomi lebih baik daripada yang keluar, yang pada umumnya mereka mengikuti transmigran sebelumnya.

Sebagai pusat konsentrasi sebagaimana besar penduduk Indonesia Pulau Jawa memiliki tingkat keunggulan komparatif fasilitas-fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan investasi. Fasilitas-fasilitas daya tarik bagi orang yang akan berpindah ke Pulau Jawa bukan merupakan daya dorong bagi yang akan ke luar Pulau Jawa. Ini terbukti dari tingginya akses penduduk secara relatif maupun absolut untuk memperoleh berbagai pelayanan tersebut. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut juga tercermin dari pola migrasi yang berkembang di Pulau Jawa pada dasawarsa sembilan puluhan ini.

Secara keseluruhan migrasi masuk dan migrasi keluar intraregional sebagai berikut. Perpindahan penduduk antarpropinsi di Pulau Jawa menunjukkan propinsi yang dominan, kemudian perpindahan dari dan ke Sumatra, dan disusul pulau-pulau lain. Menurut konsep migrasi semasa hidup, tercatat sekitar 51 persen dari 10.318.803 jiwa migran yang keluar dari Jawa adalah migran intraregional. Peranan Sumatra sebagai penampung migran dari Jawa juga penting, sekitar 34,2 persen dari mereka yang tercatat sebagai migran keluar Jawa berpindah ke Sumatra.

Pola migrasi yang dibentuk oleh konsep migrasi risen dari Jawa menunjukkan dua hal yang penting. Pertama, lebih dari dua pertiga (67,8 persen) dari 3.258.848 orang yang melakukan

perpindahan di Jawa adalah migran intraregional, yang mencerminkan semakin peneningnya peranan DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya sebagai penyerap migran intraregional di Jawa. Kedua, peranan Sumatra semakin kecil (18,1 persen), tetapi kawasan Indonesia bagian Timur mulai menunjukkan peranan pentingnya dalam mengakomodasi migran dari Jawa.

Meskipun secara umum Pulau Jawa dalam jaring-jaring migrasi nasional dikategorikan sebagai daerah pengirim migran utama bersama sama dengan Bali, secara khusus sebenarnya DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dinilai sebagai daerah penerima migran. Migrasi masuk ke kedua propinsi ini, terutama di perkotaan, cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Propinsi-propinsi lain, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur lebih berperan sebagai daerah pengirim migran menurut konsep migrasi semasa hidup maupun migrasi risen.

Menurut konsep migrasi semasa hidup, sekitar 6.937.224 jiwa tercatat lahir di luar propinsi tempat tinggalnya sekarang. Sekitar 75 persen adalah migran intraregional dan sekitar 15,4 persen migran masuk dari Sumatra. Sumbangan dari pulau-pulau lain dalam migrasi masuk ke Jawa pada umumnya masih kecil, di bawah 3 persen. Sementara itu, menurut konsep migrasi risen dapat dikenali bahwa sekitar 2.328.108 jiwa yang menetap di Jawa berpindah dalam waktu lima tahun terakhir. Komposisinya menurut daerah asal sekitar 76,7 persen migran berasal dari Pulau Jawa merupakan migran intraregional dan sekitar 14,1 persen merupakan migran dari Sumatra. Untuk kawasan Indonesia Bagian Timur, tampaknya hanya Kalimantan yang menyumbang sekitar 3 persen dari migran risen di Jawa.

Posisi Pulau Jawa dalam jaring-jaring migrasi nasional yang dilihat berdasarkan data migrasi interregional semasa hidup dan migrasi interregional risen, menunjukkan bahwa pola lama dominasi jalur Jawa-Sumatra tetap ada, meskipun sudah ada gejala awal pergeseran ke arah Indonesia Bagian Timur. Hal ini antara lain tercermin dari imbangan migrasi interregional yang menggunakan konsep migrasi semasa hidup, yang menunjukkan bahwa semua propinsi memperoleh angka neto migrasi negatif, kecuali DKI Jakarta. Dengan konsep migrasi risen, tiga propinsi memperoleh

angka migrasi neto positif, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari studi ini dapat dikenali arus utama migrasi intraregional selama lima tahun terakhir, yang mencakup jalur-jalur DKI Jakarta - Jawa Tengah, Jawa Barat - Jawa Tengah, Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada umumnya volume migrasi selama lima tahun terakhir pada jalur-jalur tersebut mencapai angka di atas 700.000 migran. Arus-arus migrasi intraregional utama yang dapat terdeteksi dari studi ini antara lain jalur Sumatra - DKI Jakarta, Sumatra - Jawa Barat, Jawa Tengah - Sumatra dan Jawa Timur - Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Perpindahan penduduk pada jalur-jalur tersebut rata-rata mencapai angka di atas 100.000 orang selama lima tahun terakhir.

Pola migrasi intraregional yang ada sekarang cenderung masih menempatkan DKI Jakarta sebagai penerima migran utama dengan daerah penyebaran di Jawa Barat. Tampaknya migrasi intraregional yang berkembang sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat investasi di kawasan Jabotabek (Jakarta Bogor Tangerang Bekasi). Untuk migrasi interregional masuk ke Jawa, selain DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai kawasan industri yang menawarkan kesempatan kerja dan usaha, juga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat konsentrasi fasilitas pelayanan pendidikan tinggi. Pola migrasi interregional keluar dari Jawa telah mengukuhkan posisi Jawa sebagai daerah pemasok utama migran ke Sumatra. Selain itu terdapat gejala dini semakin pentingnya arus migrasi. Jawa Timur dan Kalimantan Timur merupakan daerah yang menawarkan kesempatan kerja sektor ekstraktif.

Rekomendasi yang diberikan secara sektoral antara lain memberikan arahan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan di luar Jawa masih perlu diperhatikan, terutama untuk mengatasi jarak absolut antara pengguna jasa kesehatan dan pusat pelayanan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu diberikan lebih banyak melalui fasilitas pelayanan keliling (mobile service unit). Hal ini dapat berupa Puskesmas Keliling, Perpustakaan Keliling, dan pelayanan lain yang secara periodik berkeliling untuk mengurangi jarak absolut bagi pengguna jasa.

Dalam sektor transportasi dan komunikasi, usaha mendekatkan



pelayanan transportasi dan komunikasi secara absolut juga menjadi prinsip utama rekomendasi. Untuk transportasi misalnya, peningkatan prasarana perhubungan yang sudah ada (jalan, jembatan, dan pelabuhan penyeberangan) perlu memperoleh perhatian yang lebih besar di luar Jawa. Hal ini perlu diikuti dengan kebijakan kredit berbunga rendah untuk pengadaan sarana transportasi, misalnya mobil dan speedboat, dalam rangka membuka isolasi daerah. Perluasan jangkauan fasilitas pelayanan komunikasi dapat dilakukan setelah transportasi lebih baik.

Sektor ekonomi (investasi) perlu diperhatikan sebab tersedianya kesempatan kerja yang produktif merupakan kunci tercapainya kesejahteraan manusia. Dengan pekerjaan yang produktif orang akan memperoleh pendapatan yang cukup untuk berbagai barang dan jasa pelayanan. Untuk menciptakan kesempatan kerja yang produktif, investasi diarahkan secara teknologi pada karya dan menyebar ke daerah-daerah yang belum berkembang industrinya di luar Jawa. Meskipun secara ekonomis kebijakan semacam ini agak bertentangan dengan prinsip-prinsip aglomerasi ekonomi, diperlukan suatu kemauan politis (political will) dari pemerintah untuk mewujudkannya. Dengan kebijakan semacam ini diharapkan kemauan pemerintah untuk lebih menekankan transmigrasi swakarsa mandiri akan terwujud karena transmigran mungkin bekerja lain di luar sektor pertanian.

#### ABSTRACT

The study on migration in Java is, as a whole, aimed at identifying the relative position of this island in the national migration network. This general objective is further analyzed into two main groups : 1) identifying the volume and trend of intermigration and the interregional migration, and 2) identifying the mainstream of migration between Java and the other regions, and explanations about factors which give the

form of certain patterns. Eventually, out of the identification of these two objectives interpretations are then made in the form of conclusions to make recommendations about sectoral policies to be able to direct migration to play its role in development either in individual, local, regional or national level.

To achieve these objectives the study uses the 1990 Population Census, and also the 1980 and 1985 Population Censuses to observe the development of the volume and direction of migration from and to Java. The study on the stream and volume of migration is only based on the two migration concepts, the lifetime migration and the recent migration. Concerning the concept of recent migration, the discussion on the trend and volume of migration is not used in the study, since the pattern resulting it is similar to that formed by the lifetime migration concept. When the study was being carried out, data about the characteristics of the individuals and of the migrants' households had not been wholly processed by the Central Bureau of Statistics, and thus the migration determinants on the individual level could not yet been reported. In some cases, data are taken from the existing research results and from other formal publications.

The study shows that the Island of Java, which has been known as the most developed region of Indonesia, has better demographic, social, and economic conditions and infrastructures compared with the other islands. Some demographic variables such as the number, structure, and space distribution of population seem to be greatly determined by the existing socioeconomic service facilities and infrastructures. Thus, the variables of supply of infrastructural facilities emerge as a significant determinant in the study of inter as well as interregional migration.

The position of Java as the core island of Indonesia tends to be increasingly stronger from time to time, and has, at the same time, caused the other regions to become peripheries. This could be observed, among other, by the spatial distribution dynamics of the demographic and socioeconomic aspects which imply that there is a process of concentration about the infrastructure

facilities in transport and communication, social and economic service facilities followed by demographic development which, quantitatively, only slightly lessened the partialities of the existing spacial distribution. Qualitatively, people who immigrated to Java were those of the educated and those who have better socioeconomic background than people who outmigrated to other islands who were real transmigrants or who followed their fellow migrants who had left earlier.

As a concentration centre of the majority of people of Indonesia, The Island of Java has some comparative superiority in the supply of socioeconomic facilities as well as investments which may become the pull factor to people who want to migrate to Java, and not push factor to those who are bound to transmigrate. This is proved by the high access of people who either relatively or absolutely want to obtain these various services. The logical consequences of these conditions is described by the migration patterns which developed in Java during the decade of 1990s.

As a whole, the in-and out-of interregional migration shows a most dominant proportion, followed further by migration from and to Sumatra and other islands. According to the lifetime migration concept, about 51 percent out of 10,316,803 migrants who transmigrated from Java were interregional migrants. The role of Sumatra as the receiving region for migrants from Java is still important. This can be observed by the fact that 34.2 percent of all migrants from Java moved to Sumatra.

The pattern of migration formed by the recent migration concept from Java shows two important factors. Firstly, more than two thirds (67.8 percent) out of 3,256,848 people who performed population mobility in the Island of Java were interregional migrants, the fact of which described the increasingly important role of DKI Jakarta and its surrounding regions in absorbing interregional migrants of Java. Secondly, the role Sumatra became less and less important (18.1 percent) and many regions of the eastern parts of Indonesia began to show their important role in accommodating migrants from Java.

Even though, as a whole, in terms of national migration the Islands of Java and Bali have been categorized as the main

sending regions, yet, specifically, DKI Jakarta and West Java are actually more known as the receiving migrants regions. Immigration to these two regions, especially to the cities, tends to increase from time to time. Meanwhile, according to the concept of either lifetime migration or recent migration, other provinces such as Central Java, Yogyakarta Special Region, and East Java are more notified for their sending of migrants.

According to the lifetime migration concept, about 6,937,224 persons are identified as being born outside the province where they now live. About 75 percent of the number are interregional migrants, followed by 15,4 percent of immigrants from Sumatra. Supports from other islands concerning migrants to Java are, on the whole, small (3 percent). Meanwhile, according to the recent migration concept, about 2,328,108 people who live permanently in Java have performed transmigration during the last five years. The composition, by villages of origin shows that 76,7 percent came from Java as interregional migrants and 14.1 percent came from Sumatra as ordinary migrants. From East Indonesia, it seems that only Kalimantan sent 3 percent of recent migrant to Java.

In the national migration network, the position of Java, based on data of lifetime interregional migration and recent interregional migration, shows that the old patterns of the domination line between Java and Sumatra still exists, even though a shift to the eastern part of Indonesia has been initiated. This is observed by the the balance of the interregional migration which used the lifetime migration concept, all of which shows that all provinces have obtained a negative net migration rate except Jakarta Specific Region. By using the recent migration concept, three provinces, Jakarta Region, West Java and Yogyakarta Special Region have obtained positive net migration rate.

From the study, one can identify the main stream of interregional migration which has taken place for the last five years, covering the traffic lines between DKI Jakarta and Central Java, West Java and Central Java, and between Central Java and Yogyakarta Special Region. Generally, the volume of the above

three lines has, during the last five years, reached more than 700,000 migrants. The main streams of interregional migration which could be noted in the study are among others the lines between Sumatra and DKI Jakarta, Sumatra and West Java, Central Java and Sumatra, east Java and Sumatra, and East Java and Kalimantan, particularly East Kalimantan. The population movements using these have covered about 100,000 persons on average during the last five years.

The percent interregional migration pattern still has placed Jakarta Specific Region as the main area of receiving migrants and its distribution in the areas of West Java. The development interregional migration seems to be greatly influenced by the highly increasing investments that take place in the regions of Jabotabek. Concerning interregional migration to Java, it shows that, except DKI Jakarta and West Java which offered countless employment opportunities, Yogyakarta Special Region also forms a center of service facilities on higher education. The interregional migration pattern to outside Java has strengthened the position of Java to become the main island of sending migrants to Sumatra. Besides, there is the symptom that, the more important the streams of migrants, the Provinces of East Java and East Kalimantan form the regions which offer employment opportunities in the extractive sector.

Sectoral recommendations imply that in the regions outside Java the sectors of health services and education need much greater attention, especially to cover the enormous gap between the utilization of health services and the service center. Health services and education demand better facilities on mobile services units. This could be in the forms of Mobile Community Health Centers, Mobile Library services, and several other mobile periodical services in order to lessen the absolute gap with the service users.

In the transportation and communication sectors, these services also become one of the main objectives. In transportation, for instance, improvement of communication facilities such as roads, bridges, and harbours, should be given greater attention in regions outside Java. This could be realized

among others with the acquisition of credits with low interests for benefits of transportation facilities such as small-scale motorcars, speedboats for crossing the rivers and opening the many isolated areas. The expansion of communication service facilities could be realized when better transport facilities are already in function.

The economic investment sector should realize that the availability of productive employment opportunities is the most important the production employment sector the population would earn sufficient income to obtain many kinds of commodities and enjoy various services. In order to create productive employment opportunities, investments should be technologically directed to labour intensive activities and should be geographically distributed evenly in areas outside Java where industrialization is still poorly developed. Even though such policy is politically contradictive with the economic agglomeration principles, certain political will is badly needed from the government to realize the above objectives. The government is expected that self-initiated transmigration should be stimulated and realized since, in reality, transmigrants need other occupations beside working in the agricultural sector.

## Daftar Isi

Pengantar	i
Intisari	ii
Abstrak	v
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	4
1.3. Tinjauan Pustaka	4
1.4. Metode Penelitian	9
1.4.1. Data dan Sumber Data	10
1.4.2. Konsep dan Definisi	11
1.4.3. Metode Analisa	13
Bab II Deskripsi Daerah Penelitian	15
2.1. Keadaan Geografis	15
2.1.1. Luas, Letak dan Batas	15
2.1.2. Fisiografis	16
2.1.3. Penggunaan Lahan	18
2.1.4. Jaringan Sarana dan Prasarana Jalan	20
2.2. Keadaan Kependudukan	22
2.2.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk	22
2.2.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk	23
2.2.3. Struktur Umur dan Jenis Kelamin	26
2.3. Kebijakan Pembangunan	31
Bab III VOLUME DAN ARAH MIGRASI PENDUDUK	39
3.1. Status Migrasi	39
3.1.1. Pedesaan	39
3.1.2. Perkotaan	41
3.1.3. Pedesaan dan Perkotaan	43
3.2. Pola Umum Migrasi	45
3.2.1. Pola Umum Migrasi Keluar	46

4.2.2.Pola Umum Migrasi Masuk	47
3.3. Migrasi masuk Semasa Hidup	49
3.3.1.Migrasi Masuk semasa Hidup Desa	49
3.3.2.Migrasi Masuk Semasa Hidup kota	53
Bab IV Kesimpulan dan Implikasi Kebijaksanaan	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2.Implikasi Kebijaksanaan	59
Daftar Pustaka	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampai dasawarsa 1990-an ini pada dasarnya masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia masih pada jumlah besar, sebagian berada dalam taraf hidup miskin, laju pertumbuhan relatif masih tinggi, serta geografis yang timpang. Selain dari segi kuantitas, segi kualitas sebagai sumber daya manusia juga masih dapat dikatakan rendah. Sofian Effendi (1991) misalnya melaporkan rendahnya tingkat pendidikan dan Mantra (1991) menunjukkan bahwa profil kependudukan di Indonesia sudah semakin membaik, meskipun juga diakui rendahnya pendidikan penduduk.

Akibat langsung dari karakteristik kependudukan yang demikian ini, sekarang dan dalam waktu 25 tahun yang akan datang masih akan berwujud sulitnya memperoleh lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, angka pengangguran yang tinggi dan mungkin juga makin meningkat, terjadinya kemelaratan yang kronis meskipun laporan-laporan resmi menunjukkan semakin mengecilnya proporsi penduduk miskin, dan terjadinya kesenjangan pertumbuhan antardaerah. Soemarwoto (1989) berpendapat bahwa yang terjadi selama ini adalah eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam di daerah padat penduduk, sementara di daerah yang sumber daya alamnya melimpah justru belum tereksploitasi secara optimal.

Meskipun eksploitasi optimal itu merupakan suatu konsep yang dinamis, Suharso (1982) berpendapat bahwa jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi sebenarnya bukan merupakan persoalan besar bila tersebar secara proporsional seimbang antara satu pulau dengan yang lain. Dengan mengamati persebaran penduduk antarpulau di Indonesia sejak tahun 1920, diperoleh informasi bahwa secara garis besar terjadi penurunan relatif di Pulau Jawa dan peningkatan secara absolut di pulau-pulau lain. Kenaikan paling menonjol dialami oleh Pulau Sumatra, secara pasti proporsi penduduk yang tinggal di Sumatra meningkat dari waktu ke waktu baik secara relatif maupun absolut. Pola yang berlawanan dialami oleh Pulau Jawa, yang selalu menunjukkan kecenderungan penurunan

relatif jumlah penduduknya, meskipun secara absolut selalu mengalami peningkatan.

Ketimpangan persebaran penduduk antarpulau ini sudah disadari sejak zaman kolonial Belanda bahkan sudah ada usaha-usaha dari pemerintah kolonial untuk menyebarkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa dalam bentuk program kolonisasi yang dimulai sejak 1905. Pada awal implementasi program ini daerah tujuan adalah Sumatra dan orientasinya semata-mata bersifat demografis, yaitu pemerataan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk. Pada perkembangan berikutnya program perpindahan penduduk ini juga diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan orientasi yang lebih luas mencakup tujuan-tujuan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya yang optimal, perbaikan hidup transmigran, serta pertahanan dan keamanan.

Usaha-usaha pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatra oleh pemerintah kolonial yang diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut mampu menjadi pemicu terjadinya aliran migran secara swakarsa. Hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, dan Supas 1985 secara konsisten mencatat arus perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatra sebagai yang terbesar, meskipun secara relatif berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat yang sama propinsi-propinsi di Indonesia bagian timur mulai menarik perhatian migran dari Jawa.

Bila ditelusuri lebih lanjut ternyata daerah-daerah yang memiliki daya tarik tinggi bagi migran antarpropinsi di Indonesia adalah daerah-daerah yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, baik oleh investari pada bidang industri prosesing maupun industri ekstraktif. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur merupakan propinsi-propinsi yang memiliki keunggulan komparatif dalam industri prosesing dan mampu menarik banyak migran, sedangkan Kalimantan Timur dan Riau merupakan propinsi yang memiliki keunggulan komparatif pada bidang industri ekstraktif.

Mantra dkk. (1988) membuat tipologi daerah-daerah di Indonesia menurut peranannya dalam jaring-jaring nasional yang meliputi :

- a. daerah pengirim migran utama, yakni Pulau Jawa dan Bali;
- b. daerah pengirim dan penerima migran, yakni Pulau Sumatra dan
- c. daerah penerima migran saja, yakni pulau-pulau lain.

Tipologi ini dapat dikatakan masih agak kasar, namun sudah cukup memadai dan dapat digunakan sebagai titik pangkal pemahaman fenomena migrasi dari dan ke setiap tipe daerah.

Dari tipologi di atas, Pulau Jawa termasuk ke dalam kategori pengirim migran utama. Ini bukan berarti bahwa migrasi masuk ke Jawa tidak penting karena sampai saat ini daya tarik Pulau Jawa sebagai pusat pelayanan berbagai fasilitas pemerintah, ekonomi, pendidikan dan kesehatan berskala nasional memang belum ada bandingannya. Jadi, migran yang masuk ke Pulau Jawa pada umumnya adalah mereka yang datang dengan tujuan memperoleh pelayanan-pelayanan di atas, selain motif ekonomi yang memang paling menonjol di negara sedang berkembang pada umumnya. Sebaliknya, migran yang keluar dari Jawa kebanyakan memiliki motif ekonomi yang tinggi, seperti yang terjadi pada kelompok penduduk transmigran.

Analisis Mantra dkk (1988) yang menggunakan hasil Sensus Penduduk 1980 dan Supas 1985 menunjukkan bahwa secara kualitatif migran masuk ke Jawa lebih berkualitas daripada migran yang keluar dari Jawa. Ini dibuktikan dengan lebih tingginya tingkat pendidikan migran masuk daripada keluar Jawa. Selanjutnya hal ini juga mencerminkan terjadinya arus brain drain dari daerah hinterland ke daerah pusat, yang akan cenderung memperlebar dikotomi Jawa - luar Jawa, sekaligus membuktikan preposisi Titus (1978) bahwa Jawa merupakan core dari Indonesia dan daerah lain merupakan periphery.

Dari uraian di atas terlihat bahwa migrasi sebagai fenomena geografi yang dapat menetralkan dislokasi sebaran sumber daya manusia dan sumber daya alam secara kuantitatif berperan semakin penting dalam mekanisme redistribusi penduduk di Indonesia secara alamiah; namun ada bukti lain yang secara kualitatif mengisyaratkan adanya akumulasi tenaga terdidik di Jawa. Untuk memahami hal yang sangat pelik ini diperlukan analisis mendalam pada arah dan volume migrasi yang sedang berjalan beserta

perkembangannya dan juga karakteristik migran masuk dan keluar ke dan dari Jawa. Namun demikian mengingat keterbatasan data yang tersedia saat penelitian ini dilakukan, hanya arah dan volume migrasi saja yang dianalisis. Variabel-variabel lain baik yang tercakup dalam kelompok fasilitas pelayanan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan antarpropinsi akan diperlakukan sebagai suatu kelompok variabel pengaruh terjadinya arus migrasi yang tengah berlangsung.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Secara detail penelitian ini bermaksud mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memahami volume dan arah migrasi keluar dan masuk dari dan ke Pulau Jawa beserta perkembangannya dari waktu ke waktu.
2. Memahami volume dan arah arus migrasi utama intraregional dan interregional dari ke Pulau Jawa beserta perkembangannya dari waktu ke waktu.
3. Merumuskan implikasi kebijaksanaan sektoral dari penemuan-penemuan yang diperoleh dari hasil kajian.

## 1.3. Tinjauan Pustaka

Di kebanyakan negara berkembang pola migrasi internal yang banyak terjadi adalah migrasi desa-kota, namun banyak pula migrasi intraregional dan interregional, sedangkan migrasi desa-kota merupakan komponen yang terbesar. Tumbuhnya kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang yang terjadi secara spektakuler banyak ditentukan oleh perpindahan penduduk dari desa. Situasi semacam ini sudah lama menjadi perhatian pemerintah di negara-negara sedang berkembang.

Hasil inventarisasi UN yang diselenggarakan pada tahun 1976 menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara sedang berkembang menyatakan ketidakpuasan dengan pola persebaran penduduknya. Dua pertiga dari negara-negara yang diteliti ingin memperlambat

migrasi desa-kota dan hanya 12 persen yang ingin mempercepatnya. Ini menunjukkan bahwa fungsi migrasi sebagai mekanisme keseimbangan ternyata seringkali justru memperburuk ketimpangan yang sudah ada (Jones and Richter, 1981).

Gerakan penduduk yang tidak terarah dan terencana telah memunculkan pertanyaan mengenai efek yang secara teoritis dimainkan oleh migrasi dalam pembangunan sosial ekonomi nasional. Migrasi pada kenyataannya dilihat sebagai suatu mekanisme pembangunan. Hal ini terutama berlaku di negara-negara maju karena migrasi membantu menjaga keseimbangan penduduk dan sumber daya lainnya. Di negara-negara sedang berkembang migrasi juga berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial. Pertumbuhan penduduk kota di banyak negara tidak ditimbulkan oleh rangsangan pertumbuhan ekonomi, namun oleh tekanan penduduk dan stagnasi ekonomi di pedesaan (Kongsiri, 1980).

Jauh hari sebelumnya, Kuznets dan Thomas (1985) telah menguji fungsi migrasi internal dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat analisis agregat. Mereka sampai pada hubungan kedua faktor itu sebagai berikut.

1. Ketimpangan rasio penduduk dan lahan akan memiliki efek pada ekonomi di berbagai bagian negara dan akan merangsang migrasi internal.
2. Lebih banyak penduduk di daerah jarang penduduk sangat mungkin untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang diperlukan oleh daerah-daerah yang telah berpenghuni.
3. Efek terbesar dan terpenting dari pertumbuhan ekonomi pada migrasi internal terjadi melalui efek perbedaan dalam kemajuan teknologi pada kesempatan ekonomi yang berbeda-beda di berbagai daerah.
4. Redistribusi penduduk sebagai respons perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah dapat dilakukan dengan mengatur pertumbuhan alami maupun migrasi. Migrasi internal dibandingkan dengan pertumbuhan alami lebih terlihat tepat digunakan sebagai pendamping pertumbuhan ekonomi.

Pandangan-pandangan kedua penulis ini lebih condong memandang migrasi sebagai faktor yang menyumbang secara positif pada pertumbuhan ekonomi. Jadi terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut.

Migrasi sebagai fenomena perpindahan penduduk antarpropinsi di Indonesia juga dipandang memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah (Mantra dkk, 1988 dan Sunarto, 1985), baik bagi daerah asal maupun daerah tujuan. Hal ini dihubungkan dengan berkembangnya suatu kenyataan bahwa migrasi antarpropinsi di Indonesia dilakukan kebanyakan oleh tenaga kerja dan semula underutilized, yang kemudian dapat menemukan pekerjaan di daerah tujuannya. Dengan demikian, fenomena migrasi antarpropinsi dalam konteks pembangunan di Indonesia dapat ternetralisasi atau membantu menetralisasi dislokasi sebaran sumber daya antardaerah. Sumber daya manusia dengan karakteristiknya yang mobile dapat dioptimalkan pemanfaatannya di daerah-daerah yang memerlukannya melalui proses migrasi antarpropinsi. Selain memberikan dampak positif di daerah tujuannya, fenomena migrasi antarpropinsi ini juga sedikit banyak akan memberikan dampak juga pada daerah asalnya, baik pada tingkat rumah tangga maupun tingkat daerah.

Pada tingkat agregat daerah sumbangan yang diberikan oleh migran baik secara ekonomis maupun nonekonomis sangat besar artinya. Hal ini dapat berwujud sumbangan finansial maupun ide-ide baru untuk pembangunan daerah asal. Selain itu, pada tingkat rumah tangga sumbangan pendapatan migran terhadap total pendapatan rumah tangga seringkali lebih besar daripada pendapatan di daerah asal. Hasil-hasil penelitian di Indonesia pada tingkat makro dan mikro banyak memberikan dukungan pada preposisi tersebut (Mantra dkk, 1988; Sunarto, 1985).

Migrasi di Indonesia dan di negara-negara sedang berkembang pada umumnya dilakukan oleh penduduk usia potensial bekerja, atau dengan kata lain motif utama migrasi di negara-negara sedang berkembang adalah motif ekonomi. Hal ini juga telah memberikan dasar pada perumusan model migrasi oleh Todaro (1969) yang menerangkan fenomena migrasi sebagai fungsi bekerjanya dua variabel, yakni (1) perbedaan pendapatan riil antara desa-kota dan (2) kemungkinan memperoleh pekerjaan di kota. Model migrasi

dari Todaro ini sangat rentan terhadap kritik karena banyak hal, antara lain dalam menghubungkan tiga fenomena divergensi pendapatan desa-kota, tingkat pengangguran di kota, dan migrasi dari desa ke kota. Tidak secara pasti dapat diambil kesimpulan bahwa migrasi adalah konsekuensi dari perbedaan pendapatan antara desa kota bila kita mengamati masih adanya faktor pengangguran di kota. Selain menunjukkan kelemahan teori migrasi dari Todaro tersebut, Amin (1974) menunjukkan dengan contoh bahwa orang-orang Bassari di Senegal yang lebih miskin ternyata tidak melakukan migrasi ke daerah lain, sedangkan orang-orang Serere yang pendapatannya tinggi justru lebih mobil.

Amin juga mengajukan model migrasi yang dinamakan pendekatan dependensi dan center-periphery. Menurut model ini migrasi di negara-negara sedang berkembang terutama ditentukan oleh tingkat integrasi wilayah dengan ekonomi pasar dunia serta ditentukan pula oleh peran yang dimainkan oleh penduduk daerah itu dalam proses integrasi tersebut. Dengan acuan negara-negara di Afrika, Amin membuat delineasi tiga tipe wilayah menurut tingkat integrasinya dengan ekonomi pasar dunia sebagai berikut :

- a. Daerah-daerah yang sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi pasar dunia, termasuk perkotaan. Di daerah-daerah semacam ini orientasi produksi adalah untuk ekspor, banyak lahan-lahan milik perorangan dan banyak pula tenaga kerja bayaran (buruh) sehingga terjadi surplus migrasi masuk karena daya tarik tersebut.
- b. Daerah-daerah yang secara marginal terintegrasi dengan ekonomi pasar dunia. Daerah semacam ini muncul sebagai produk dari proses neokolonisasi yang memaksa tenaga kerja murah tetap bertahan sehingga sumber daya lokal tetap tidak terjamah. Di daerah semacam ini terjadi surplus migrasi keluar.
- c. Daerah terisolasi yang sama sekali belum terintegrasi dengan ekonomi pasar dunia. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami migrasi tenaga kerja keluar dan masuk.

Amin juga memperhatikan beberapa faktor sosiokultural dari penetrasi budaya barat seperti pendidikan dan kerja misionaris yang cenderung merenggangkan jarak terhadap kebudayaan lokal dan terjadinya migrasi juga meningkat.

Studi migrasi penduduk dengan menggunakan model Amin ini di Indonesia pernah dilakukan oleh Titus (1978) dengan data hasil Sensus Penduduk 1971. Secara rinci studi ini ditujukan : (1) untuk mengetahui adanya hubungan antara pola-pola migrasi, faktor-faktor migrasi, dan tipe daerah center atau periphery; (2) faktor-faktor apakah yang dimainkan oleh kebijakan pemerintah, dan (3) seberapa jauh kesesuaian model Amin untuk kondisi Indonesia.

Hasil studi Titus ini menunjukkan bahwa pendekatan center-periphery dari Amin ini terbukti relevan untuk kondisi Indonesia, meskipun sebenarnya model Amin memerlukan beberapa adaptasi untuk dapat menerangkan heterogenitas karakteristik center dan periphery yang ada di Indonesia. Migrasi yang mencerminkan hubungan center-periphery ditunjukkannya dengan adanya migran terdidik yang masuk ke Jawa ke daerah periphery sebagai transmigran. Hal ini menunjukkan terjadinya pengalihan sumber daya manusia maupun keuangan yang diinvestasikan dalam bidang pendidikan di Luar Jawa ke Jakarta pada khususnya. Tenaga-tenaga terdidik di luar Jawa yang memanfaatkan fasilitas pendidikan di Jawa maupun luar Jawa lebih menyukai tinggal dan bekerja di Jawa, khususnya Jakarta.

Selanjutnya dikemukakan bahwa peranan kebijakan pemerintah tampak sangat menentukan terjadinya berbagai tipe kesenjangan sosial dan interregional, juga volume, arah dan komposisi migran antardaerah. Ditunjukkannya juga bahwa indikator-indikator pembangunan dan pola migrasi yang ada mengisyaratkan adanya proses menuju kesenjangan antardaerah yang lebih lebar. Akhirnya, hanya kebijakan yang berorientasi pemerataan dan terdesentralisasi saja yang menurutnya akan mampu mengakhiri masalah ini.

Studi-studi yang dilaksanakan setelah itu, misalnya Mantra dkk. (1988) dan Harahap (1991) masih tetap menemukan adanya arus brain drain dari luar Jawa ke Jawa. Ini berarti bahwa usaha-usaha



pemerataan yang dicanangkan pemerintah lewat prioritas Trilogi Pembangunan yang menekankan pada gatra pemerataan daripada pertumbuhan dan stabilitas serta Delapan Jalur Pemerataan masih perlu dipacu dalam implementasinya. Bahkan tulisan Titus (1992) yang meneropong disparitas antardaerah di Indonesia masih juga sampai pada kesimpulan yang sama meskipun sudah mengisyaratkan adanya sedikit perubahan.

*In summary we may conclude that at present economic integration and economic growth have reached nearly all types of region in Indonesia, but that their development is still very uneven so that the general pattern of dominance of the centre-type and the peripheral 'boom' type regions has not yet changed fundamentally (Titus, 1992).*

Studi ini menyoroti arah, volume, dan kecenderungan migrasi di Jawa dengan data hasil Sensus Penduduk 1990. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Alatas (1988) dengan menggunakan data Supas 1985 menunjukkan bahwa arus migrasi penduduk keluar Jawa lebih besar maupun risen. Pola migrasi yang berkembang di Jawa adalah arus Jawa - Sumatra dan sebaliknya, yang sebenarnya berakar dari program kolonisasi yang dimulai pada awal abad ini.

#### 1.4. Metode Penelitian

Analisis mengenai dinamika mobilitas penduduk di beberapa propinsi dan pulau di Indonesia ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisa data sekunder. Sebagai salah satu keterbatasan utama metode analisis semacam ini, kajian mengenai suatu pokok pembahasan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan data. Jadi ketersediaan data lebih menentukan mengenai arah ke mana analisis akan dibawa, namun salah satu kelebihanannya adalah tidak diperlukannya lagi kegiatan pengumpulan dan pemrosesan data. Secara rinci pembahasan tentang metode analisis ini dibatasi pada 4 (empat) pokok yang terdiri atas data dan sumber data, konsep dan definisi, metode analisis dan sistematika penyajian laporan.

#### 1.4.1 Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam analisis ini sebagian besar berasal dari hasil Sensus Penduduk Tahun 1990 dilengkapi dengan data-data sekunder yang juga dikumpulkan oleh Biro Statistik yang terhimpun dalam Buku Saku Statistik Indonesia. Selain ini digunakan pula data-data hasil pencacahan Sensus Penduduk 1980 dan Supas 1985 untuk data migrasi dan hasil kajian profil penduduk Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada. Materi pendukung yang lain diperoleh dari hasil-hasil penelitian oleh Alatas (1988), Mantra dkk. (1988), dan Mantra dkk. (1991) mengenai topik yang sama.

Secara rinci data-data yang digunakan dalam penelitian ini beserta sumbernya disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data dan Sumber Data**

No.:	Uraian Data	Sumber Data
1.	Migrasi Total Seumur Hidup dan Resen 1980	Sensus Penduduk 1980 (hasil tabulasi)
2.	Migrasi Total Seumur Hidup dan Resen 1985	Supas 1985 (hasil tabulasi)
3.	Migrasi Total Seumur Hidup dan Resen 1990	Sensus Penduduk 1990 (hasil tabulasi)
4.	Kondisi geografis, kependudukan, profil ekonomi daerah, fasilitas pelayanan sosial - ekonomi daerah penelitian.	Buku Saku Statistik Indonesia 1991 Penduduk Indonesia selama PJPT I PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha, BPS 1992.
5.	Informasi penelitian terdahulu	Alatas, 1988 Mantra, Ida Bagus dkk 1991

Sebagai satu catatan tambahan, data mengenai karakteristik migran yang kehadirannya dalam analisis dapat menjelaskan banyak hal sampai penelitian dimulai belum selesai diproses di BPS. Akibatnya, analisis ini tidak dilengkapi dengan informasi mengenai karakteristik migran yang mampu menjelaskan fenomena migrasi produk pembuatan keputusan pada tingkat individu. Meskipun begitu adanya data-data sekunder yang tercatat baik pada tingkat agregasi propinsi diharapkan dapat mengisi gap yang mungkin ada. Hasil-hasil kajian terdahulu dapat pula digunakan sebagai pemandu menuju pemahaman terhadap arah dan volume migrasi yang berkembang saat ini.

#### 1.4.2 Konsep dan Definisi

Dalam daftar pertanyaan Sensus Penduduk 1980 dan 1990 serta Supas 1985 terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai migrasi penduduk, yaitu :

- a. propinsi tempat lahir;
- b. propinsi tempat tinggal terakhir sebelum di propinsi tempat tinggal sekarang;
- c. lamanya tinggal di propinsi ini; dan
- d. propinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dapat dipilahkan antara penduduk migran dan nonmigran. Tipologi penduduk bukan migran dan migran menurut waktu mereka menetap di satu propinsi tertentu diberikan selengkapnya pada Tabel 1.2.

Untuk mengetahui volume dan arus migrasi penduduk di Jawa digunakan dua indikator migrasi penduduk, yaitu migrasi penduduk semasa hidup (lifetime migration) dan migrasi risen (recent migration). Penggunaan setiap indikator tentu saja memiliki kelemahan-kelemahan disamping kelebihan-kelebihan. Penggunaan kedua indikator tersebut secara bersama-sama akan memberikan hasil analisis yang lebih baik karena kelemahan satu indikator akan ditutup dengan kelebihan pada indikator lain. Kelemahan dan kelebihan penggunaan setiap pertanyaan dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 1.3.

Tabel 1.2  
Migran dan Bukan Migran berdasarkan Keempat Pertanyaan dalam  
Sensus Penduduk 1990

No.	Pertanyaan	Migran	Bukan Migran
1.	Propinsi tempat lahir	Seseorang yang dicacah di suatu propinsi yang bukan propinsi tempat kelahirannya. Migran ini disebut migran semasa hidup (lifetime migrant)	Seseorang yang dicacah di propinsi tempat ia dilahirkan
2.	Lamanya tinggal di propinsi ini	Seseorang yang lamanya bertempat tinggal di propinsi sekarang lebih pendek dari umurnya	Seseorang yang bertempat tinggal di propinsi sekarang selama hidupnya
3.	Tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di propinsi ini	Seseorang yg propinsi tempat tinggal terakhir berbeda dengan propinsi tempat ia dicacah. Migran ini disebut migran total (total migrant)	Seseorang yang bertempat tinggal di propinsi sekarang selama hidupnya
4.	Propinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu	Seseorang di mana propinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan propinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Migran ini disebut migran risen (recent migrant)	Seseorang di mana propinsi tempat tinggal sekarang sama dengan tempat tinggal 5 tahun yg lalu

Rencana tabel disesuaikan dengan Zachariah (1977:125)

- a. Tabel silang yang menunjukkan volume dan arah migrasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Tabel-tabel dalam kelompok ini diperoleh dari hasil Sensus dan Supas.
- b. Tabel silang yang menunjukkan perbandingan mengenai persebaran proporsi atribut suatu variabel antardaerah yang diamati. Sumber tabel-tabel ini antara lain dari publikasi resmi BPS dan data-data sekunder lainnya.

**Tabel 1.3**  
Keuntungan dan Kekurangan pada Penggunaan Setiap Pertanyaan  
dalam Sensus Penduduk 1990

Pertanyaan	Keuntungan	Kekurangan
Tempat kelahiran (migran semasa hidup)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudah dimengerti</li> <li>2. Memberikan konfigurasi geografis migran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu perpindahan tidak diketahui</li> <li>2. Menganggap terjadinya perpindahan satu tahap</li> <li>3. Mengabaikan migrasi kembali</li> </ol>
Lamanya tinggal di propinsi tempat tinggal sekarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhitungkan adanya migrasi kembali</li> <li>2. Memberikan waktu terjadinya perpindahan terakhir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kohor migrasi mungkin sudah dikurangi migrasi kembali dan kematian</li> <li>2. Tempat asal tidak diberikan</li> </ol>
Tempat tinggal terakhir sebelumnya	Memberikan informasi tentang migrasi satu tahap terakhir	Tidak ada referensi waktu pindah
Tempat tinggal tahun sebelumnya	Referensi waktu migrasi jelas diberikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang yang lahir selama referensi waktu tidak dihitung sebagai migran</li> <li>2. Sulit untuk melakukan estimasi migrasi antar-sensus</li> </ol>

Sumber : Disesuaikan dengan Zachariah (1977 : 126)

#### 1.4.3 Metode Analisis

Analisis data yang pada dasarnya mencakup tindakan penyederhanaan penyajian data dan pembuatan interpretasi dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis tabel tunggal dan analisis tabel silang sesuai dengan keperluan. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini disederhanakan dalam bentuk tabel silang. Meskipun semua data disajikan dalam bentuk tabel silang, fungsi tabel silang dalam analisis ini dapat dibedakan sebagai berikut.